



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menentukan arah dan ukuran keberhasilan pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Yahukimo, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Yahukimo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);

21. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Yahukimo (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 53);
22. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 61 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Yahukimo (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 61).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Yahukimo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Yahukimo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Yahukimo.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Yahukimo.
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran berhasil dari suatu Tujuan dan Sasaran Strategis organisasi dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022-2026.

Pasal 3

- (1) IKU Kabupaten merupakan pedoman kinerja yang digunakan oleh SKPD untuk :
 - a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
 - b. penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
 - c. menyusun Laporan Kinerja (LKj); dan
 - d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Yahukimo Tahun 2022-2026.
- (2) IKU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4

BAPPEDA, Inspektorat dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Yahukimo, berkewajiban melakukan :

- a. monitoring atas penerapan IKU Kabupaten dan SKPD; dan
- b. monitoring dan evaluasi atas capaian IKU Kabupaten dan SKPD untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Yahukimo.

Ditetapkan di : Sumohai,
Pada Tanggal : 10 Januari 2022
BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai

Pada tanggal : 10 Januari 022

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ELAI GIBAN, SE, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 1

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009



Lampiran : Salinan Peraturan Bupati Yahukimo
 Nomor : 1 Tahun 2022
 Tanggal : 10 Januari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN YAHUKIMO
 PERIODE 2022 -2026

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		FORMULASI INDIKATOR	SUMBER DATA
Misi 1 : Meningkatkan Iman dan Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa					
1.	Meningkatnya budaya religius	1.	Proporsi penduduk terhadap tempat ibadah	Perbandingan antara jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
		2.	Persentase aktivitas keagamaan dilingkungan pemerintah dan masyarakat	Jumlah kegiatan ibadah yang dilaksanakan di lingkungan pemerintah dibandingkan jumlah ibadah sesuai ketentuan dikali 100 %	Sekretariat Daerah
2.	Meningkatnya kerukunan umat beragama	1.	Indeks Kerukunan Umat beragama	Tingkat Kerukunan Umat Beragama berdasarkan data Kementerian Agama	Kantor Kesbangpol
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berbudaya					
1.	Meratanya akses pendidikan	1.	Rata-Rata Lama Sekolah	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.	Dinas Pendidikan
2.	Meningkatnya derajat kesehatan	1.	Angka Harapan Hidup	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di Kabupaten Yahukimo	Dinas Kesehatan
3.	Optimalnya pengembangan kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.	Jumlah Atlet yang Berprestasi Nasional	Jumlah Atlet yang menerima penghargaan / dengan jumlah atet dalam pembinaan di kali 100%	Dinas Pemuda dan Olah Raga

4.	Meningkatnya prestasi pemuda dalam pembangunan	1.	Persentase Pemuda Yang Berperan Dalam Pembangunan	Jumlah pemuda yang aktif berperan dibagi dengan jumlah keseluruhan pemuda di kali 100%	Dinas Pemuda dan Olah Raga
5.	Meningkatnya efektifitas pengembangan dan pendidikan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat	1.	Persentase Muatan Nilai- Nilai Budaya Lokal Dalam Jenjang Pendidikan	Kegiatan dengan nilai muatan lokal dibandingkan keseluruhan kegiatan pendidikan di kali 100 %	Dinas Pendidikan
6.	Meningkatnya pelestarian budaya asli Papua	1.	Cakupan Budaya Benda dan tak Benda Yang Dilestarikan	Jumlah kegiatan pelestarian budaya benda dan tak benda	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
7.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keluarga Bencana	1.	Persentase Keluarga Berencana Yang Aktif	Jumlah keluarga berencana yang aktif dibagi dengan jumlah keseluruhan keluarga berencana di kali 100%	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
8.	Optimalnya Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (KS)	1.	Jumlah Keluarga Sejahtera	Jumlah Keluarga yang termasuk klasifikasi Sejahtera	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
9.	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	1.	Pengeluaran Perkapita (IPM)	Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.	Dinas Perindakop dan UKM
10.	Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Miskin dan Rentan Miskin	1.	Indek Kedalaman Kemiskinan	ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.	Dinas Sosial
11.	Meningkatnya Pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP)	1.	Persentase Kegiatan Yang Melibatkan OAP	Jumlah kegiatan pemerintah daerah yang melibatkan Orang Asli Papua (OAP)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Misi 3 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Mandiri, Berkelanjutan Dan Inklusif Berbasis Potensi Lokal					
1.	Meningkatnya Efektifitas Penyerapan Tenaga Kerja	1.	Proporsi Tenaga Kerja Yang Terserap Sesuai Tingkat Pendidikan	Jumlah tenaga kerja yang terserap dibandingkan seluruh tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja
2.	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	1.	Tingkat Produktifitas Regional	Tingkat Produksi di suatu sektor dibandingkan jumlah tenaga kerja di sektor yang sama	Dinas Tenaga Kerja
3.	Meningkatnya Produktifitas Regional Sektor-Sektor Ekonomi Kerakyatan	1.	Rasio Produktifitas Regional Sektor-Sektor Ekonomi Kerakyatan	Nilai pendapatan sektor UMKM dibandingkn pendapatan total kabupaten	Dinas Perindakop dan UKM
4.	Meningkatnya Produksi Industri Mikro dan Kecil Berbasis Pertanian	1.	Pertumbuhan Produksi Industri Mikro dan Kecil Berbasis Pertanian	Jumlah produksi industri Mikro dan Kecil Berbasis Pertanian	Dinas Perindakop dan UKM
5.	Meningkatnya Produksi Perdagangan Besar Dan Eceran Berbasis Muatan Lokal	1.	Pertumbuhan Produksi Perdagangan Besar dan Eceran	Jumlah kegiatan perdagangan besar dan eceran	Dinas Perindakop dan UKM
6.	Meningkatnya Koperasi Yang Berdaya saing	1.	Pertumbuhan Koperasi Aktif	Jumlah koperasi yang aktif	Dinas Perindakop dan UKM
7.	Berkembangnya Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.	Cakupan Destinasi Pariwisata Yang Dipasarkan	Jumlah destinasi wisata yang dipromosikan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8.	Meningkatnya penanganan kerawanan Pangan penduduk	1.	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah desa yang sudah ditangani	Dinas Ketahanan Pangan
9.	Terpenuhinya akses masyarakat terhadap Pemenuhan kebutuhan barang- barang konsumsi	1.	Pengeluaran Perkapita	Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.	Dinas Perindakop dan UKM

10.	Meningkatkan Daya Saing Daerah	1.	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks daya saing daerah berdasarkan dat BRIN	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
11.	Berkembangnya Potensi-Potensi Investasi Berbasis Sumber Daya Ekonomi Lokal	1.	Tingkat Pertumbuhan Pengembangan Ekonomi Lokal	Pertumbuhan pendapatan sektor ekonomi lokal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
12.	Meningkatnya Pendapatan Penduduk Golongan Menengah Kebawah	1.	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Misi 4 : Meningkatkan Kesadaran Hukum, Sosial, Politik dan HAM					
1.	Meningkatnya Pemenuhan HAM	1.	Persentase Pelaksanaan HAM	Jumlah pelanggaran HAM yang ditindak dibandingkan jumlah keseluruhan pelanggaran HAM	Kesbangpol
2.	Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak	1.	Indeks Pemberdayaan Gender	Nilai Indeks Pemberdayaan Gender berdasarkan data Kementerian PPA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA
		2.	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	Nilai Komposit Kesejahteraan Anak berdasarkan data Kementerian PPA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA
3.	Menurunnya Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	1.	Persentase Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah pelanggaran dan ketertiban yang ditindak dibandingkan keseluruhan jumlah Jumlah pelanggaran dan ketertiban	Satuan Polisi Pamong Praja
4.	Menurunnya Kriminalitas, Kejahatan dan Konflik Dalam Kehidupan Bermasyarakat	1.	Angka Kriminalitas	Jumlah Kriminalitas	Satuan Polisi Pamong Praja
5.	Optimalnya Pelayanan Terhadap PMKS	1.	Persentase Pelayanan PMKS	Peserta PMKS yang dilayani dibandingkan jumlah seluruh peserta PMKS	Dinas Sosial

6.	Optimalnya Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia	1.	Cakupan Pelayanan Penduduk Lanjut Usia	Jumlah penduduk usia lanjut yang dilayani dibandingkan seluruh jumlah penduduk usia lanjut	Dinas Sosial
7.	Meningkatnya Pembinaan Dan Pemberdayaan KAT	1.	Persentase Pemberdayaan KAT	Jumlah lokasi KAT yang diberdayakan dibandingkan seluruh jumlah lokasi KAT	Dinas Sosial
8.	Meningkatnya Kebebasan Hak Sipil	1.	Skor Aspek Kebebasan Hak Sipil	Nilai Indeks Demokrasi Kabupaten berdasarkan BPS	Kantor Kesbangpol
9.	Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Politik	1.	Skor Aspek Pemenuhan Hak-Hak Politik	Nilai Indeks Demokrasi Kabupaten berdasarkan BPS	Kantor Kesbangpol
10.	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Kelembagaan Demokrasi	1.	Skor Kualitas dan Kuantitas Kelembagaan Demokrasi	Nilai Indeks Demokrasi Kabupaten berdasarkan BPS	Kantor Kesbangpol
Misi 5 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan					
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas penduduk antar distrik dan kampung	1.	Pertumbuhan Tingkat Konektivitas Penduduk	Jumlah distrik yang sudah terkoneksi dengan sarana transportasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	1.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar	Jumlah fasilitas pendidikan dan kesehatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3.	Meningkatnya tata Kelola Pertanahan	1.	Proporsi Sertifikat Kepemilikan Tanah	Jumlah sertifikat tanah dibandingkan jumlah persil secara keseluruhan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.	Optimalnya penyelenggaraan pemukiman dan tata ruang	1.	Tingkat Kepatuhan Terhadap Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (Penggunaan Lahan Eksisting/Pola Ruang) x 100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5.	Meningkatnya Kualitas dan Baku Mutu Air	1.	Pencemaran Air	Indeks Kualitas Air	Dinas Lingkungan Hidup
6.	Meningkatnya Kualitas Udara	1.	Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Dinas Lingkungan Hidup
7.	Meningkatnya Tutupan Lahan	1.	Tutupan Lahan	Indeks Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup
8.	Menurunnya tingkat resiko bencana	1.	Jumlah Kampung Siaga Bencana	Jumlah kampung yang sudah ditetapkan sebagai kampung siaga bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Misi 6 : Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima Yang Didukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Berdayasaing dan Berintegritas					
1.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Publik	1.	Skor Relatif Mutu Pelayanan	Nilai penilaian pelayanan public oleh masyarakat	Sekretariat Daerah
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	1.	Predikat Kinerja Pelayanan Publik	Opini Kualitas Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah
3.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Akuntabel dan Transparan	1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan permendagri	BPKAD
4.	Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Aparatur	1.	Persentase ASN Yang Sesuai Dengan Standar Kompetensi	Jumlah ASN yang sudah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah seluruh ASN	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
5.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat terhadap peran DPRD sesuai Fungsinya	1.	Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Seketariat DPRD	Persentase kepuasan publik terhadap pelayanan sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
6.	Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan daerah	1.	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

7.	Meningkatnya ketersediaan data makro dan mikro statistic pembangunan daerah	1.	Cakupan Kelengkapan Data SPID	Data SPID eksisting dibandingkan jumlah data SIPD sesuai ketentuan.	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
8.	Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi daerah secara optimal	1.	Persentase Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Kabupaten	Sarana prasarana persandian eksisting dibandingkan sarana prasarana persandian sesuai dengan ketentuan	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
9.	Optimalnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kepustakaan dan Arsip Daerah Yang Berkualitas	1.	Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Kepustakaan Dan Arsip Daerah	Sarana prasarana arsip dan perpustakaan eksisting dibandingkan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
10.	Meningkatnya Ketersediaan Database Kependudukan	1.	Persentase Data Dasar Kependudukan Terpilah	Data dasar kependudukan yang terpilah dibandingkan data dasar kependudukan sesuai ketentuan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
11.	Optimalnya Pengelolaan EGovernment	1.	Indeks Egovernment	Kegiatan pemerintah daerah yang menerapkan prinsip egovernment dibandingkan seluruh kegiatan pemerintah daerah	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai

Pada tanggal : 10 Januari 2022

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ELAI GIBAN, SE, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 1



